

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, Pemprov Sumbar menjadikan pemberdayaan masyarakat di bidang pengolahan ikan sebagai salah satu prioritas utama. Melalui berbagai inisiatif, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berupaya memperkuat fasilitas pengolahan ikan dalam beberapa tahun terakhir. Guna mendorong pendapatan dan memperkuat perekonomian, tujuannya agar fasilitas pengolahan ikan terus berinovasi dan berkembang.

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada bab V mengenai tahapan pemberdayaan UPI yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menggunakan teori pemberdayaan Kartasmita yakni enabling, empowering, dan protecting. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan seluruh tahapan pemberdayaan, namun belum semuanya memberikan hasil yang maksimal. Pada tahap enabling, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat menciptakan iklim dan mendorong kesadaran melalui sosialisasi pentingnya industri pengolahan dalam memberikan nilai tambah, memperpanjang umur simpan, dan memproduksi lebih banyak jenis barang olahan karena didorong oleh meningkatnya jumlah hasil tangkapan dan budidaya perikanan. Pada tahap empowering, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah membantu memperkuat potensi seperti memberikan bantuan sarana dan prasarana baik dalam bentuk alat maupun bahan

serta memberikan program pelatihan. Namun tidak semua unit pengolahan mendapatkan bantuan tersebut setiap tahunnya, hanya beberapa unit pengolahan saja yang mendapatkan bantuan. Dan untuk program pelatihan yang disediakan oleh DKP Sumbar hanya 1 atau 2 kali dalam setahun untuk satu program yang ada. Pada tahap terakhir yakni protecting, DKP Sumbar kurang berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat KJA yang tidak sesuai dengan ketentuan. Idealnya di Danau Maninjau itu hanya 6.000 KJA tetapi tahun 2023 terdapat 23.000 KJA sehingga menyebabkan tercemarnya perairan. Disamping itu juga, masih banyak UPI yang tidak memiliki SKP dikarenakan tahap administrasinya yang sedikit ribet.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan setiap tahapan pemberdayaan. Namun, terdapat sebagian tahapan masih belum terwujud dengan baik.

6.2 Saran

Peneliti membuat sejumlah rekomendasi berdasarkan temuan yang telah diberikan mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui proram pengolahan dan pemasaran hasil perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan program pelatihan yang terbuka untuk umum, tidak hanya beberapa daerah saja. Agar peluang untuk masyarakat untuk melakukan pengolahan pada ikan lebih besar. Hal ini juga memajukan beberapa aspek dan menaikkan jumlah konsumsi ikan.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bersama masyarakat saling bekerjasama terhadap permasalahan yang ada disekitar agar tidak menghambat usaha yang sedang dijalankan.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terjun pada unit pengolahan ikan untuk mengedukasi lagi bahwa SKP itu wajib dan meyakinkan pelaku usaha bahwa pengurusan SKP tidak sulit.

